

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Penerima Program Indoensia Pintar di Kelurahan Ujung,
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh :

FATONI

NIM : I71215026

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

AGUSTUS 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : FATONI

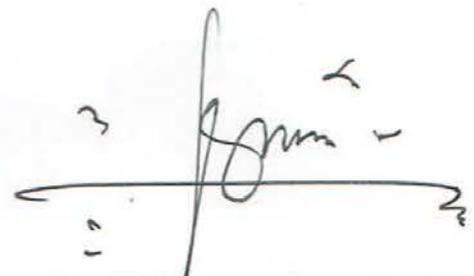
NIM : I71215026

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Yang Berjudul : **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Penerima Program Indonesia Pintar di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya)**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 04 Agustus 2019

Pembimbing



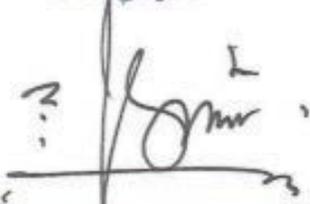
Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Fatoni “IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Penerima Program Indoensia Pintar di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Juli 2019.

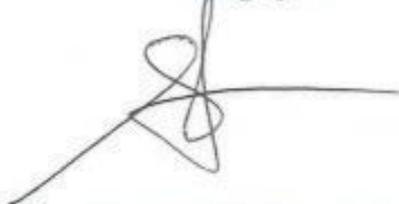
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji III



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji IV



Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP.197402091998031002

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FATONI

NIM : I71215026

Program Studi : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan
Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Penerima
Program Indonesia Pintar di Kelurahan Ujung Kecamatan
Semampir Kota Surabaya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 04 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Fatoni


NIM.I71215026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATONI
NIM : I71215026
Fakultas/Jurusan : ILMU POLITIK
E-mail address : fatoni.toni23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Penerima Program Indonesia Pintar di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

(FATONI)

ABSTRAK

Fatoni, 2019. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Penerima Program Indonesia Pintar Di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya). Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya ketidaktepatan sasaran program Indonesia Pintar ini di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 2.) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari implementasi Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan memakai Teori Implementasi George Edward III dan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, proses-proses dalam menjalankan sebuah kebijakan telah dilakukan oleh berbagai pihak guna menjalankan sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar kualitas pendidikan masyarakat dapat berubah. setidaknya ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan mulai dari sumberdaya manusia dan sumberdaya non-manusia, komunikasi pihak Dinas Pendidikan selaku implementator dengan lembaga pendidikan, Struktur Birokrasi yakni ada sebuah pembagian kewenangan agar sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain, Disposisi dimana dinas pendidikan membagi tugas untuk pelaksanaan atau implementasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya PIP dibagi menjadi 2 yakni faktor Pendukung dan penghambat. Yang pertama yakni faktor pendukung setidaknya terdapat 5 faktor atau variabel yang dapat mendukung berjalannya implementasi mulai dari karakteristik agen pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, kondisi ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya terkait dengan faktor yang menghambat penulis dapat menyimpulkan yakni adanya ketidaktepatan sasaran kebijakan ini serta sering telatnya pencairan dana akibat dari kurang pahami masyarakat dalam proses pencairan dana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Bantuan Dana

ABSTRACT

Fatoni, 2019. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Penerima Program Indonesia Pintar Di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya). Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

This research begins with the interest of researchers in seeing that there is an inaccurate target of this smart Indonesia program in Ujung Kelurahan, Semampir City, Surabaya. There are two formulations of the problem related to this research 1.) How is the Implementation of Permendikbud Number 19 of 2016 concerning the Smart Indonesia Program in Improving the Quality of Community Education in Ujung Kelurahan, Semampir District, Surabaya, 2.) What factors support and hinder the implementation of Permendikbud Number 19 of 2016 concerning the Smart Indonesia Program in Improving the Quality of Community Education in Ujung Village, Semampir District, Surabaya City. The purpose of this study is to find out how the implementation and the factors that support and hinder the implementation of Permendikbud No. 19 of 2016 in Ujung Kelurahan, Semampir, Surabaya. To answer these problems the researchers used descriptive qualitative methods. In this qualitative study the researchers used data collection techniques such as observation, interviews, documentation. The theory used uses the George Edward III Implementation Theory and the Van Meter and Van Horn Implementation Theory.

The results of this study show that, the processes in implementing a policy have been carried out by various parties in order to carry out a policy that has been issued by the central government so that the quality of public education can change. there are at least 4 factors that can affect the operation of a policy ranging from human resources and non-human resources, communication from the Education Office as the implementator with educational institutions, bureaucratic structure, namely there is a division of authority so that a policy does not overlap with other parties, the disposition of where the department education divides the tasks for the implementation or implementation in accordance with the level of education in the Surabaya City Education Office. Then related to the factors that influence the running of PIP is divided into 2 namely Supporting and inhibiting factors. The first is that there are at least five factors or variables supporting factors that can support the implementation of implementation starting from the characteristics of implementing agencies, standards and policy objectives, relations between organizations, resources, economic, social and political conditions. Furthermore, related to factors that hinder the author can conclude, namely the inaccuracy of the objectives of this policy and the frequent disbursement of funds due to lack of understanding of the community in the process of disbursing funds.

Keywords: policy implementation, smart Indonesia Program, Fund assistance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual	10
1. Implementasi	10
2. Kebijakan	12
3. Implementasi Kebijakan	13
4. Program Indonesia Pintar	16
5. Kualitas Pendidikan	17
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Pustaka	26
1. Program Indonesia Pintar	26
2. Landasan Hukum Program Indonesia Pintar	28
C. Teori Implementasi Kebijakan	31
1. George C. Edward III	32
2. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Pemilihan Informan dan Pemilihan Objek Penelitian	39
D. Tahap-Tahap Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
H. Sistematika Pembahasan	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	52
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	52
2. Gambaran Umum Kecamatan Semampir	57
3. Gambaran Umum Kelurahan Ujung	59
B. Data dan Fokus Penelitian	63
1. Profil Kelurahan Ujung	64
2. Profil Dinas Pendidikan Kota Surabaya	73
C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016	76
D. Analisis dan Pembahasan	78
1. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar	78
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar	87
E. Temuan Hasil Penelitian	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

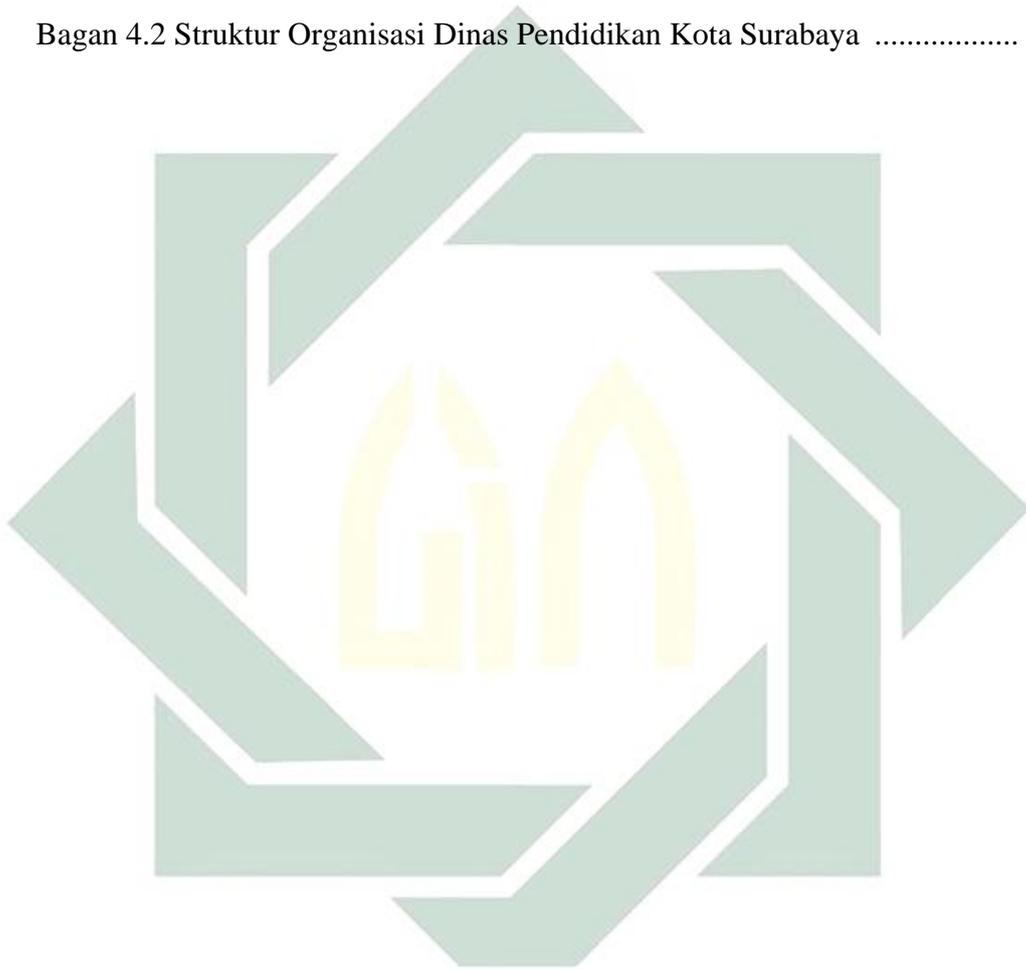
104

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016
2. Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016
3. Daftar Nama Penerima KIP
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keterangan (Bukti Melakukan Penelitian)
6. Biodata
7. Hasil Cek Turnitin/Plagiasi
8. Kartu Bimbingan Skripsi

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman	47
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Ujung	65
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya	73



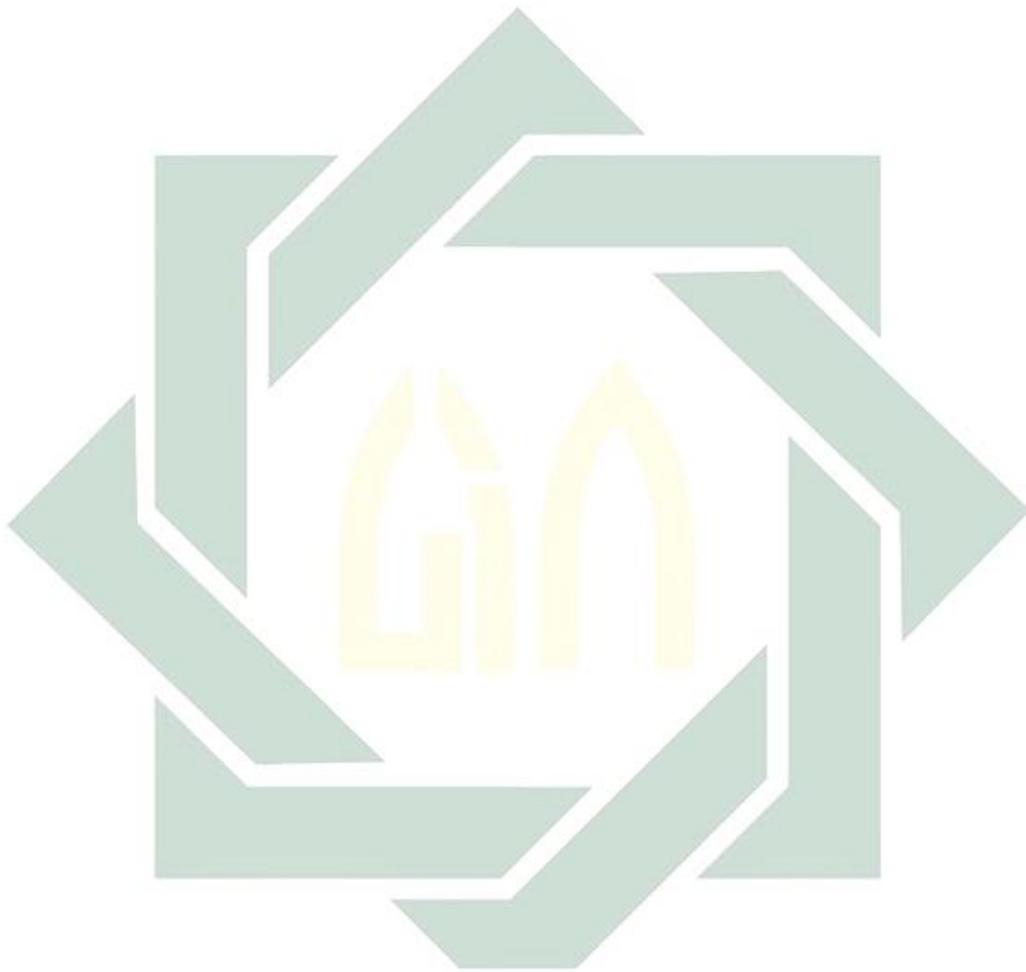
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
Kecamatan Semampir	4
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Wilayah (Km ²) Kota Surabaya	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin	
Hasil Registrasi Tahun 2016 Kota Surabaya	53
Tabel 4.3 Presentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kota Surabaya	
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	54
Tabel 4.4 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya	
Di Kota Surabaya	55
Tabel 4.5 Keuangan Daerah Kota Surabaya	56
Tabel 4.6 Pengeluaran Belanja menurut fungsi	56
Tabel 4.7 Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Semampir	
Tahun 2016	57
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi	
Tahun 2015 dan Tahun 2017 Kota Surabaya	57
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
Per-Kelurahan Di Kecamatan Semampir	58
Tabel 4.10 Jumlah Pemeluk Agama Per Kelurahan Hasil Registrasi	
Tahun 2015	58
Tabel 4.11 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	60
Tabel 4.12 Pendidikan Masyarakat Kelurahan Ujung	61
Tabel 4.13 Jumlah Pemeluk Agama di Kelurahan Ujung	62
Tabel 4.14 Profesi Masyarakat Kelurahan Ujung	62

Tabel 4.15 Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar

Kota Surabaya Tahun 2016-2018 77

Tabel 4.16 Hasil Temuan Dilapangan 96



ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah serta berperan strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan bangsa. Ketika tingkat pendidikan dikatakan tinggi, setidaknya menggambarkan bahwa pola pikir dan peradaban masyarakat di daerah tersebut juga tentunya sudah baik. Upaya-upaya pemerintah mengenai pendidikan perlu dihargai. Namun juga perlu komitmen dan konsistensi pelaksanaan yang jelas dan tepat sasaran di tataran sekolah. Tujuannya agar peningkatan mutu sekolah, sehingga lulusan-lulusan yang handal akan terpenuhi. Keberhasilan pelajar ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor individu itu sendiri, guru, sarana dan prasarana pembelajaran, serta lingkungan.

Dalam *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1* disebutkan “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*” dan dalam *pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945* juga dijelaskan bahwa “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan*

Dalam tabel tersebut terlihat tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat kelurahan ujung menjadi yang rendah diantara kelurahan yang ada. Maka dari itu penulis mencoba mencari jawaban atas data yang telah diperoleh guna mencari sebab-sebab terjadinya hal tersebut.

Kelurahan Ujung adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sebagian besar penduduknya merupakan urbanisasi dari utara Kota Surabaya. Menurut data sensus BPS Surabaya pada tahun 2016 Jumlah penduduk di Kelurahan Ujung mencapai 35.416 jiwa.

Dengan luas 1,62 km² Kelurahan Ujung merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinannya tertinggi di Kota Surabaya. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan atau isu-isu penduduk yang banyak terjadi pada penduduk dengan perekonomian yang rendah di suatu daerah atau kawasan karena disebabkan oleh berbagai hal. Selain itu jika melihat kondisi yang ada terkait dengan pendidikan yakni sarana dan prasarana di Kelurahan Ujung juga terdapat kendala yakni tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dalam hal pendidikan juga kurang memadai.

Selain tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) salah satu faktor yang juga dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan ini yaitu banyaknya penduduk yang memiliki pendapatan yang rendah, dan didukung dengan banyaknya penduduk yang datang untuk mencari pekerjaan tetapi tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang matang

- g. *“Pengaturan dirjen perbendaharaan nomor per-16/PB/2012 tentang petunjuk pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana bantuan siswa miskin dan beasiswa bakat dan prestasi.”*
- h. *“Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja DIREKTORAT pembinaan SD tahun 2016 nomor ; 023.03.666011/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta revisinya.”*
- i. *“Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja DIREKTORAT pembinaan SMP tahun 2016 nomor ;023.03.666032/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta revisinya.”*
- j. *“Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja DIREKTORAT pembinaan SMA tahun 2016 nomor ;023.03.1.419514/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta revisinya.”*
- k. *“Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja DIREKTORAT pembinaan SMK tahun 2016 nomor ;023.03.1.419515/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta revisinya.”*
- l. *“Keputusan menteri agama RI nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman program Indonesia pintar pada kementerian agama sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri agama*

terjadi di dalam birokrasi yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan yang telah dirumuskan

Terkat dengan *standar dan sasaran dari kebijakan* tersebut setidaknya harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi yang namanya multiinterpretasi serta dapat dengan mudah menimbulkan sebuah konflik di antara para agen implementasi atau implementator.

Kemudian jika *hubungan antar-organisasi* tentu dalam banyak program atau kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dari pihak lain ini dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sumberdaya. Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya non-manusia atau pun sumberdaya manusia.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. faktor ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung kesuksesan implementasi dari sebuah kebijakan; bagaimana sifat dan opini masyarakat yang ada di lingkungan tempat sasaran dari kebijakan tersebut, karakteristik para partisipan, apakah mendukung ataupun menolak; serta apakah para elite politik yang ada di lingkungan tersebut bisa mendukung dari implementasi sebuah kebijakan.

3. *Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/ verification)*

Langkah *ketiga* menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Terkait dengan kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, kesimpulan yang telah diperoleh dengan melalui thapan reduksi data serta penyajian data telah ditemukan bukti-bukti kuat berupa pengimplementasian atau realisasi dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, serta hasil wawancara bersama dengan informan penelitian. Setelah mendapatkan data dan fakta di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa implimentasi kebijakan Progran Indonesia Pintar ini perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan pencairan dana serta tepat sasaran atau tidaknya di lapangan.

- e) *“Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.”*
- f) *“Melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.”*
- g) *“Melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.”*
- h) *“Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian”.*
- i) *“Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.”*
- j) *“Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.”*
- k) *“Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.”*

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Dalam menjalankan semua program, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dibantu oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Jika mengacu pada struktur organisasi, Dinas Pendidikan Kota Surabaya terbagi menjadi 4 bidang yakni: *Pertama*, Bidang Sekolah Dasar yang terdiri dari Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kurikulum Sekolah Dasar, dan Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar. *Kedua*, Bidang Sekolah Menengah yang terdiri dari Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Kurikulum Dan Pembinaan Sekolah Menengah, serta Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah. *Ketiga*, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian dan Olahraga yang terdiri dari Seksi Kesenian dan Olahraga, Seksi Pendidikan Keluarga dan PAUD, dan Seksi Pendidikan Masyarakat. Serta yang *keempat*, Bidang Guru dan Kependidikan yang terdiri dari Seksi Pengembangan Kualifikasi,

Pintar ini kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 27.151 siswa setelah itu pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah siswa penerima bantuan PIP menjadi 24.273 siswa.

D. Analisis dan Pembahasan

1. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

Dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentunya harus berpihak pada masyarakat. Kemudian untuk mengetahui implementasi dari kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar diketahui peran dari stakeholder atau implementator tingkat kota/kabupaten dalam mengimplementasikan Program Kartu Indonesia Pintar. Untuk memperlancar program tersebut maka semua pihak yang terkait dengan pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab akan implementasinya program kartu Indonesia Pintar di kelurahan ujung kecamatan semampir kota Surabaya.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program dari pemerintah pusat yang berupa bantuan uang tunai yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya, program ini bermula dari adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ada pada

2) *Komunikasi*

Komunikasi dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses penyampaian suatu informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian suatu informasi terkait yang berhubungan dengan kebijakan atau aturan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pihak terkait selaku yang menjalankan ataupun menerapkan kebijakan (*policy implementors*) guna mencapaitujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika terkait dengan penyampain informasi PIP Dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi secara langsung melalui pihak sekolah dan kelurahan setempat yang kemudian diteruskan kepada masyarakat agar masyarakat yang telah terdaftar sebagai keluarga miskin atau kurang mampu dapat segera mengurus segala pesyaratan terkait dengan Program Indonesia Pintar ini dan segera berkomunikasi dengan pihak sekolah maupun pihak kelurahan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Heri selaku Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa:

“Sosialisasi itu sebenarnya lebih ke ini sih, ke pihak sekolah sama pihak kelurahan toh data-data itu selama ini kita taunya dari pusat, data penerima PIP

dengan lembaga pendidikan agar berjalannya PIP ini bisa seperti apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. *Ketiga* adalah Struktur Birokrasi yakni dalam sebuah kebijakan tentunya ada sebuah pembagian kewenangan agar sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan membagi kewenangan dalam menjalankan kebijakan PIP ini sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada yakni menjadi 3 bidang antara lain Bidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah. Dan yang *keempat* yakni Disposisi dimana Dalam hal disposisi, pada program ini dinas pendidikan membagi tugas untuk pelaksanaan atau implementasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Disini penulis mengetahui bahwa setiap menjalankan kebijakan ini dinas berkoordinasi dengan pihak sekolah.

2. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya PIP ini penulis membaginya menjadi 2 yakni faktor Pendukung dan penghambat. Yang pertama yakni faktor pendukung dimana penulis mengkorelasikannya dengan teori yang penulis gunakan sehingga setidaknya terdapat 5 faktor atau variabel yang dapat mendukung berjalannya implementasi mulai dari karakteristik agen pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, kondisi ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya terkait dengan faktor yang menghambat

- Lidia Lusiana, “*Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)*”. (Jurnal Administrasi Negara Volume 6 Nomor 1, 2018:6991-7005).
- Lilis Novia Saraswati. “*Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*”. (Jurnal Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 2017. 6737-6750).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- N. Eni Rohaeni, Oyon saryono. “*Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*”. (Journal of Education Management & Administrasi Review, Juni 2018 Volume 2 Nomor 1).
- Nanang Hanafiah Dan Cucu Suhana. 2009. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Rafika Aditama.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya.*
- Peraturan Daerah No. 5 2006 tentang organisasi kelurahan kota Surabaya.*
- Ramadhan, Ghafur Kharisma, “*Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) Di Kecamatan Sambas*”. (Volume 3 Nomer 4 Tahun 2014).
- Rini septiani astuti. “*Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP N 1 SEMIN*”. (Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Vol.VI Tahun 2017).
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Saroni, Muhammad. 2013. *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

